



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2021

**DNAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan disusun sebagai salah satu kewajiban dari rangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan LAKIP ini juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen LAKIP ini diharapkan dapat menjadi laporan dan acuan tentang akuntabilitas kinerja Ketahanan Pangan pada tahun mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan materi dan konten LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu diharapkan masukan yang bersifat membangun demi kemajuan dimasa mendatang.

Rumbia, Januari 2022



KEPALA DINAS,

MUSLIHIN, SP

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 196801011989031021



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSLUSIF.....	I
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-Isu Strategis yang Berpengaruh	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi..	6
1.5 Fungsi Ketahanan Pangan Kab. Bombana	8
1.6 Susunan Organisasi.....	8
1.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	12
1.8 Dasar Hukum.....	15
II. PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Perencanaan Strategis.....	17
2.2 Perjanjian Kinerja.....	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.....	24
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	28
IV. PENUTUP.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional tersebut antara lain ditentukan oleh kinerja pemerintah selaku penyelenggara pembangunan. Untuk mengetahui kinerja pemerintah tersebut dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diberbagai jenjang baik Instansi pemerintah pusat maupun instansi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2019 kepada Bupati Bombana, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja



tahun 2019. Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 berasal dari APBD Kabupaten Bombana sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD tahun 2019.

Penyusunan LAKIP tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibuat setiap tahun sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, serta sejalan dengan Visi dan Misionya. Pada tahun anggaran 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana telah dilaksanakan beberapa program /kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan jumlah anggaran sebesar **Rp, 2.122.641.300,00**

Melalui LAKIP ini Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2019 dapat

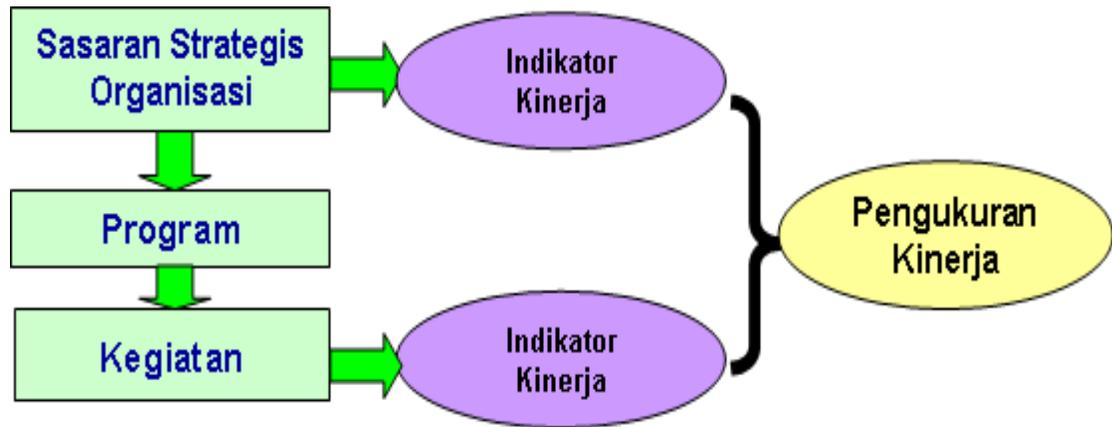


diketahui dan terukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan kinerja dimasa mendatang atau pada tahun berikutnya, oleh karena itu diharapkan LAKIP ini dapat bermanfaat terutama dalam kaitannya dengan penetapan dan pengukuran kinerja pemerintah.

Indikator kinerja, Sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana. Indikator kinerja Sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019. Gambaran pengukuran indikator kinerja tingkat sasaran dan kegiatan disajikan dalam diagram 1.1.



Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja



1.2 Isu-isu Strategis yang Berpengaruh

Isu-isu strategis yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019 terutama hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Kabupaten Bombana merupakan wilayah / daerah yang memiliki potensi alam untuk pengembangan sub sektor pertanian, sub sektor perikanan, yang sangat baik, terdiri dari dataran rendah, sedang sampai berbukit, dimana tingkat kesuburan tanahnya cukup memungkinkan untuk pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan dan didukung dengan sumber air yang banyak terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Bombana berupa sungai-sungai besar sampai laut yang luas. Disamping itu potensi



pertanian tanaman pangan, hasil bumi berupa kayu olahan dan kekayaan laut yang melimpah berupa ikan, udang dan lain sebagainya sebagai faktor pendukung kemajuan ekonomi di daerah Bombana.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Ditinjau dari segi penduduk dapat dipersentasekan bahwa 65-75 % masyarakat Kabupaten Bombana bermata pencaharian pokok sebagai Petani dengan tingkat penerimaan terhadap inovasi di bidang pertanian sangat tinggi.

3. Aspek Pasar

Letak geografis Kabupaten Bombana sebagai lalu lintas perhubungan darat maupun laut mempunyai akses yang sangat baik yang menghubungkan antara Ibukota Propinsi, antar Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara serta dengan Luar Provinsi (Sulawesi Selatan). Selain dari itu banyaknya pengusaha yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bombana yang membuka atau melakukan aktifitas perdagangan di Kabupaten Bombana.



1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dimaksudkan untuk memberikan data dan informasi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan dan tahun 2021 serta sebagai bahan evaluasi untuk dapat menjadi acuan dalam rangka perbaikan kinerja tahun berikutnya.

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1.4.1. Kedudukan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana adalah Instansi Teknis yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bombana yang memiliki lintas sektoral kompleks karena terdiri dari pertanian, perikanan dan . Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menaungi beberapa Bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana.



1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana sebagai berikut:

A. TUGAS (Pasal 6):

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketahanan Pangan.

B. FUNGSI (Pasal 7):

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan insfrastuktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;



4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan ;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

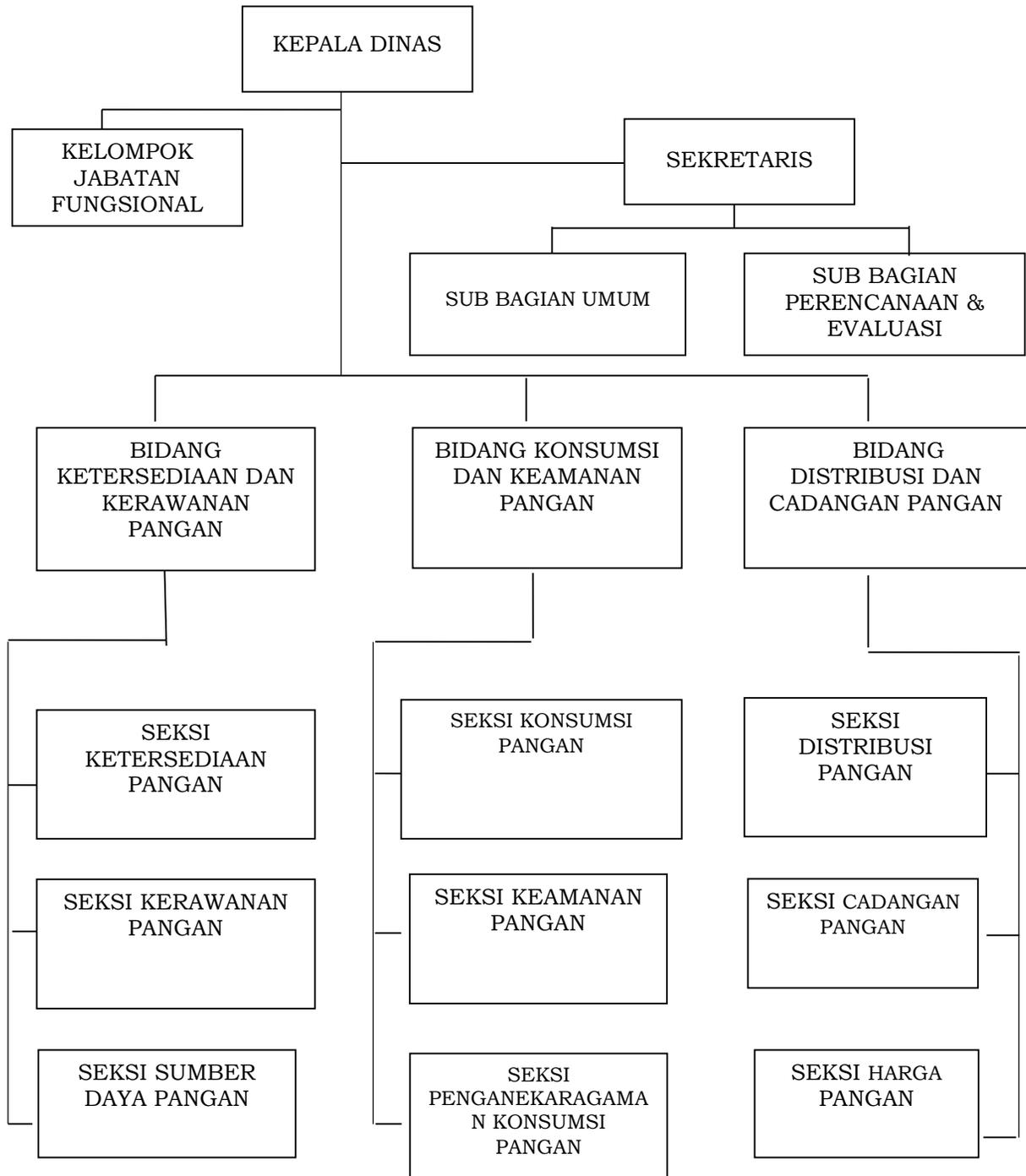
C. KEWENANGAN (Pasal 8)

1. Melaksanakan tugas manajemen pembangunan ketahanan pangan yang professional, bersih, peduli, transparan dan bebas KKN;
2. Melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan ketahanan pangan;
3. Merumuskan produk hukum dibidang ketahanan pangan yang berpihak kepada petani;
4. Melaksanakan tugas evaluasi dan pengendalian pembangunan ketahanan pangan yang efektif
 - a. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dalam penanganan ketahanan pangan.



1.6. Susunan Organisasi

Organisasi Badan Pelaksana Ketahanan pangan dan Kabupaten Bombana yang dibentuk melalui Perda No 7 tanggal 1 Juli 2008 terdiri dari :





1.6 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana

1.6.1 Sumber Daya Manusia

Ketenagakerjaan yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana sebanyak 23 Orang yang terdiri dari 18 orang PNS dan 5 PHTT/tenaga honorer. Struktur dan kondisi kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.6.1. Data PNS dan PHTT Tahun 2021

No	Tempat Tugas	Status Kepegawaian					KET
		PNS		PHTT		THL	
		Struktural	Fungsional	Staf	Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Ketahanan Pangan	18	0	5			
2	Lapangan		0	0		0	
Jumlah		18	0	5		0	
Total		23 orang					



1.6.2 Aset / Kelembagaan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tupoksinya sebagaimana uraian di atas antara lain di dukung oleh keberadaan asset/kelembagaan yang dimiliki di tingkat lapangan yang belum memadai disebabkan merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru yang dibentuk tahun 2017.

1.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1.7.1. Tantangan Pelayanan Dalam Pengembangan SKPD

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tupoksinya tentunya tidak akan terlepas dari adanya tantangan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tupoksi. Karena itu perlu upaya untuk mengidentifikasi tantangan dimaksud agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil analisis dan telaah terhadap renstra SKPD maka dapat dilaksanakan beberapa tantangan pelayanan SKPD sebagai berikut :

1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana disebabkan ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merupakan OPD yang baru terbentuk tahun 2019;
2. Terbatasnya data dan literatur tentang Ketahanan Pangan



3. Masih sedikitnya regulasi tentang Ketahanan Pangan
4. Kurangnya pegawai di instans Ketahanan Pangan
5. Terbatasnya dana (biaya untuk penyelenggaraan Ketahanan Pangan)
6. Persiapan rencana kerja yang belum optimal.

Dalam menghadapi tantangan tersebut perlu dilakukan beberapa pendekatan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan sesuai kebutuhan dan skala prioritas
2. Penyediaan sarana Ketahanan Pangan sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta tepat sasaran
3. Menciptakan/meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait guna mendapatkan dukungan program kegiatan
4. Memperluas jaringan informasi pada berbagai media dalam rangka mencapai akses informasi dan teknologi
5. Penyusunan perencanaan kerja yang tepat waktu.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Selain adanya tantangan sebagaimana uraian di atas, maka terdapat pula adanya peluang pengembangan pelayanan SKPD sebagai berikut :



1. Tersedianya kelembagaan kelompok tani yang mengelola kegiatan lumbung pangan dan Toko Tani Indonesia (TTI)
2. Tersedianya kelompok wanita tani yang mengelola kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang menopang perekonomian rumah tangga
3. Tersedianya LDPM yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi stok cadangan pangan yang menurun
4. Tersedianya dana bantuan Kawasan Mandiri Pangan dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan ekonomi kreatif tingkat masyarakat.

Di harapkan dengan adanya peluang pengembangan pelayanan tersebut mampu membantu petani-nelayan dalam mengembangkan usaha taninya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas usahanya yang sekaligus turut meningkatkan kesejahteraan petani dan kelompok wanita tani beserta kelangsungannya.

Upaya pengembangan pelayanan untuk kedepan di serahkan ketingkat lapangan (desa dan kelurahan) melalui kelembagaan kelompok tani/GAPOKTAN ataupun Kelompok Wanita Tani KWT) sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah (desa dan kelurahan) sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna. Adapun jenis kegiatan di lapangan yang



prioritas kedepan adalah percontohan/demplot/gelar teknologi KRPL, penguatan TTI, LDPM, PUPM, dan pembuatan peta kerawanan pangan.

1.8 Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana mengacu kepada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
4. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2006 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2019 – 2022.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Secara umum pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bombana ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro/ tingkat rumah tangga dan individu serta di tingkat makro/ daerah dan nasional melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sisten distribusi pangan, sub sistem konsumsi dan keamanan pangan serta penanggulangan daerah rawan pangan dengan memperhatikan potensi dan keragaman sumberdaya wilayah setempat, maka tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dengan cara :

1. Meningkatkan sarana pendukung administrasi perkantoran Dinas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
3. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
4. Memantapkan sistem distribusi, harga dan akses pangan;
5. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;



6. Meningkatkan penanganan keamanan pangan segar.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh SKPD adalah :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran ketahanan pangan
2. Dipertahankannya ketersediaan energi perkapita minimal 2500 kkal/hari dan protein perkapita 57 gram/hari.
3. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan 1% pertahun;
4. Makin mantapnya distribusi, harga dan akses pangan;
5. Tercapainya kecukupan konsumsi energi perkapita minimal 2000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gr/hari;
6. Meningkatnya keamanan pangan segar.

1). Kebijakan

Untuk mendukung strategi di atas, maka ditempuh berbagai kebijakan pendukung, yaitu :

1. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur melalui :
 - a. Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - b. Penyediaan jasa layanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, melalui :
 - a. Koordinasi lintas sektoral



- b. Peningkatan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan
3. Peningkatan sistem distribusi, stabilitas harga, dan cadangan pangan melalui :
- a. Koordinasi lintas sektor;
 - b. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat;
 - c. Pengembangan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan melalui :
- a. Koordinasi lintas sektoral;
 - b. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - c. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing;
 - d. Pengembangan penanganan keamanan pangan segar

Untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut, ditempuh 14 Rencana Aksi, yang meliputi:

1. Menjamin Ketersediaan Pangan

Kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. **Pengembangan Lahan Beririgasi dan Lahan Kering.** Kegiatan ini mencakup penetapan kawasan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan melalui penegakan peraturan secara lebih tegas,



penataan infrastruktur dan penerapan regulasi atas infrastruktur pertanian, dan penguatan status kepemilikan lahan.

- b. **Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan.** Kegiatan ini meliputi penyebarluasan penerapan teknologi konservasi dan rehabilitasi pada usaha-usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kerusakan, serta rehabilitasi lahan-lahan usaha pertanian dan kehutanan secara luas.
- c. **Pelestarian Sumberdaya Air dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.** Kegiatan ini dilaksanakan melalui penegakan peraturan untuk menjamin kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan, rehabilitasi daerah aliran sungai dan lahan kritis,. konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan dan aliran -permukaan, pengembangan infrastruktur pengairan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, serta penyebarluasan penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya air dan daerah aliran sungai.
- d. **Pengembangan dan Penyediaan Benih, Bibit Unggul dan Alsintan.** Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengembangan benih/ bibit induk unggul berkualitas spesifik lokasi, pengembangan usaha penangkaran atau produksi benih/bibit sebar unggul berkualitas yang spesifik lokasi, perakitan serta pengembangan produksi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi budidaya pertanian.



- e. **Pengembangan Skim Permodalan yang Kondusif Bagi Petani dan Nelayan.** Kegiatan ini meliputi upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami petani/nelayan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, baik dalam hal teknis administratif maupun beban finansial yang harus ditanggung petani/nelayan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pinjaman langsung bergulir kepada kelompok petani/nelayan, pengembangan usaha kredit mikro, pengembangan koperasi simpan pinjam, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya agar lebih efektif dalam membantu menyediakan modal usaha dan mendidik kedisiplinan mengelola pinjaman pada petani/ nelayan.
- f. **Peningkatan Produktivitas Melalui Perbaikan Genetis dan Teknologi Budidaya.** Kegiatan ini mencakup perakitan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul spesifik lokasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, serta untuk perbaikan teknologi budidaya untuk menekan senjang hasil antara tingkat penelitian dan tingkat petani, meningkatkan efisiensi ke arah zero waste, memperbaiki/ mempertahankan kesuburan lahan dan meningkatkan pendapatan petani.
- g. **Peningkatan Efisiensi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan.** Kegiatan ini antara lain terdiri atas perakitan dan pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, peningkatan kesadaran dan kemampuan petani/nelayan untuk memanfaatkan teknologi pasca panen dan pengolahan



yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, mendorong pemanfaatan teknologi dan peralatan tersebut melalui penyediaan insentif bagi pelaku usaha, khususnya skala kecil.

- h. **Penyediaan Insentif Investasi di Bidang Pangan.** Kegiatan ini meliputi pemberian berbagai kemudahan kepada investor untuk mengurangi biaya dan waktu di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, antara lain dalam hal perijinan, penyediaan informasi potensi dan teknologi, kepastian hukum atas penguasaan lahan/ konsesi, perpajakan dan pungutan lainnya, serta keamanan usaha dari tindak kriminal.
- i. **Penguatan Penyuluhan, Kelembagaan Petani/Nelayan dan Kemitraan.** Kegiatan ini meliputi penyusunan dan sosialisasi peraturan penyuluhan, penataan kelembagaan penyaluhan pertanian, peningkatan ketenagaan penyuluhan pertanian, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan penerapan secara meluas pendekatan pemberdayaan/ pendampingan kepada kelompok masyarakat petani/nelayan.

2. Menata Pertanahan dan Tata Ruang / Wilayah.

- a. **Pengembangan Reforma Agraria.** Kegiatan ini adalah penataan kembali kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan lahan usaha dan lahan pertanian untuk memenuhi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan kelestarian sumberdaya alam. Hal ini dilaksanakan dengan penyusunan kebijakan operasional dan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, serta melaksanakannya secara



terdesentralisasi dan partisipatif mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat.

- b. **Penyusunan Tata Ruang Daerah dan Wilayah.** Kegiatan ini meliputi perbaikan Rencana Tata Ruang Daerah dan Wilayah secara terkoordinasi antar daerah/wilayah dengan mempertimbangkan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya dan kelestarian sumberdaya alam, disertai penerapannya secara tegas dan konsisten, dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran.
- c. **Perbaikan Administrasi Pertanahan dan Sertifikasi Lahan.** Kegiatan ini meliputi perbaikan sistem pelayanan sertifikasi lahan, fasilitasi/ dukungan proses sertifikasi lahan bagi masyarakat kurang mampu dan percepatan penyelesaian masalah administrasi pertanahan secara hukum.
- d. **Penerapan Sistem Perpajakan Progresif Bagi Pelaku Konversi Lahan Pertanian Subur dan Pembiaran Lahan Pertanian Terlantar.**

Kegiatan ini meliputi penyusunan peraturan dan penerapannya secara tegas bidang perpajakan atas lahan atau usaha yang dapat menghambat/ memberatkan setiap upaya mengkonversi lahan pertanian subur, dan atau membiarkan lahan pertanian terlantar.

3. Pengembangan Cadangan Pangan

- a. **Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah.** Kegiatan ini dititikberatkan pada fasilitasi pengembangan cadangan pemerintah propinsi, kabupaten dan desa agar setiap jenjang



pemerintahan mampu mengatasi masalah kerawanan pangan sesuai kewenangan dan tanggungjawab otonominya. Pengembangan sistem cadangan pangan pemerintah secara berjenjang ini diprioritaskan pada daerahdaerah rentan kerawanan pangan, dengan jenis pangan serta sistem pengelolaan yang sesuai budaya masyarakat setempat.

- b. **Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.** Kegiatan ini meliputi fasilitasi pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat, di daerah rawan pangan kronis maupun rawan pangan darurat, agar masing-masing kelompok masyarakat mampu memanfaatkan dan mengelola sistem cadangan pangannya untuk mengatasi masalah kerawanan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Fasilitasi dilakukan dalam aspek manajemen kelompok maupun aspek teknis pengelolaan pangan sehingga kualitas dan nilai ekonominya dapat ditingkatkan.

4. Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan Yang Efisien.

- a. **Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Distribusi.** Kegiatan ini meliputi rehabilitasi dan pembangunari jalan, jembatan, pelabuhan, tempat pendaratan, serta pengembangan sistem angkutan umum yang menjangkau daerah-daerah terpencil dan rawan gangguan bencana. Pemerintah melaksanakan pembangunan pada segmen-segmen yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta, dan memfasilitasi peran swasta untuk mengembangkan segmen-segmen yang menguntungkan.



- b. **Penghapusan Retribusi Produk Pertanian dan Perikanan.** Kegiatan ini meliputi penetapan aturan penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, penelaahan terhadap peraturan pemerintah dan pemerintah daerah dan membatalkannya bila masih ada.
- c. **Pemberian Subsidi Transportasi bagi Daerah Sangat Rawan dan Daerah Terpencil.** Kegiatan ini antara lain dapat berupa penyediaan pelayanan transportasi bersubsidi oleh pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dengan swasta untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pasokan pangan pada daerah-daerah rawan pangan, rawan terisolasi dan daerah terpencil, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat di daerah tersebut.
- d. **Pengawasan Sistem Persaingan Perdagangan Yang Tidak Sehat.** Kegiatan ini meliputi pengkajian dan penerapan regulasi perdagangan yang menjamin proses yang adil dan bertanggungjawab, serta melindungi para pelaku ekonomi dari persaingan yang tidak sehat, baik antar pelaku di dalam negeri maupun antara pelaku dalam negeri dengan luar negeri.

5. Menjaga Stabilitas Harga Pangan

- a. **Pemantauan Harga Pangan Pokok Secara Berkala.** Kegiatan ini meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khususnya pada bulan-bulan tertentu saat produksi menurun dan saat kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga bermanfaat untuk



mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga

- b. **Pengelolaan Pasokan Pangan dan Cadangan Penyangga Untuk Stabilisasi Harga.** Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan beras pemerintah, serta kerja sama dengan badan-badan usaha pemerintah dan swasta dalam penyediaan cadangan penyangga bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/ dimobilisasi apabila terjadi kelangkaan pasokan atau gejolak harga.

6. Meningkatkan Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Pangan.

- a. **Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan.** Kegiatan ini meliputi pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memahami peluang dan menclaygunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Peningkatan kapasitas meliputi kemampuan berorganisasi, bekerja sama dan pembentukan modal, keterampilan mengolah sumberdaya alam, serta mengelola usaha dan mengembangkan jaringan usaha. Di samping itu diberikan pula bantuan untuk menambah aset kelompok untuk mempercepat pengembangan usahanya. Tahap selanjutnya adalah peningkatan kesadaran gizi serta sanitasi dan higiene dalam lingkungan rumah tangga.
- b. **Peningkatan Efektivitas Program Raskin.** Kegiatan ini meliputi perbaikan metoda penentuan kelompok sasaran menggunakan informasi terkini, melibatkan masyarakat desa untuk menajamkan proses seleksi kelompok sasaran, memantau dan mengawasi proses penyaluran, dan memberikan saran/umpan balik terhadap efektivitas program Raskin. Di samping itu juga



kontribusi pemerintah setempat dalam penyediaan biaya distribusi dari tingkat desa ke titik bagi.

- c. **Penguatan Lembaga Pengelola Pangan di Pedesaan.** Kegiatan ini memfasilitasi berbagai lembaga sosial masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam turut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.

7. Melaksanakan Diversifikasi Pangan

- a. **Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Gizi Seimbang.** Kegiatan ini meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumber daya keluarga untuk meningkatkan gizi.
- b. **Pengembangan Teknologi Pangan.** Kegiatan ini meliputi perekayasaan atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat.
- c. **Diversifikasi Usahatani dan Pengembangan Pangan Lokal.** Kegiatan ini antara lain adalah memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan



diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat dan bergizi, serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri.

8. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan.

- a. **Pengembangan dan Penerapan Sistem Mutu Pada Proses Produksi, Olahan dan Perdagangan Pangan.** Kegiatan ini meliputi perumusan dan penetapan sistem mutu, penyuluhan, pelayanan dan fasilitasi penerapan sistem mutu, pemantauan penerapan sistem mutu serta penghargaan terhadap produsen, pengolah dan pedagang di bidang pangan yang telah menerapkan sistem mutu dengan baik.
- b. **Peningkatan Kesadaran Mutu dan Keamanan Pangan Pada Konsumen.** Kegiatan ini meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui jalur formal maupun non formal untuk meningkatkan pemahaman terhadap mutu dan keamanan pangan serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh, serta kemampuan untuk menyeleksi pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi.
- c. **Pencegahan Dini dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan Mutu dan Keamanan Pangan.** Kegiatan ini antara lain adalah kampanye peningkatan kesadaran masyarakat atas berbagai aturan tentang mutu dan keamanan pangan, penerapan sistem pemantauan terhadap produk pangan yang



berpotensi pelanggaran dan membahayakan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Kesadaran masyarakat atas bahaya pada bahan pangan yang dikonsumsi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencegahan dini dan pengawasan.

9. Mencegah dan Menangani Keadaan Rawan Pangan dan Gizi

- a. **Pengembangan Isyarat Dini dan Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi (SKPG).** Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian pemerintah dan masyarakat khususnya di kabupaten, terhadap manfaat sistem isyarat dini serta memfasilitasi penerapannya sesuai kondisi setempat. Di samping itu juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk membangun kemampuan merespon isyarat tersebut secara tepat dan cepat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kerawanan pangan.
- b. **Peningkatan Keluarga Sadar Gizi.** Kegiatan ini antara lain meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial kepada keluarga yang membutuhkan melalui sistem komunikasi, informasi dan edukasi yang sesuai dengan situasi sosial budaya dan ekonomi setempat.
- c. **Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Peningkatan Gizi Keluarga.** Kegiatan ini antara lain adalah penyuluhan, bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.



- d. **Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi.** Kegiatan ini berupa pengeluaran cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog, oleh Menteri Sosial atas permintaan pemerintah daerah, untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan dan gizi di daerahnya.

10. Memfasilitasi Penelitian dan Pengembangan

- a. **Alokasi Anggaran yang Memadai Untuk Penelitian dan Pengembangan.** Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian berbagai lembaga terkait dalam pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran memadai untuk penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi, informasi, peralatan yang menunjang terwujudnya ketahanan pangan dan gizi.
- b. **Peningkatan Kerjasama Kemitraan Antar Lembaga Penelitian.** Kegiatan ini adalah mengkoordinasikan substansi dan memadukan sumberdaya penelitian untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penelitian, serta terlayannya kebutuhan masyarakat yang beragam oleh sumber daya penelitian yang terbatas.

11. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem penghargaan tingkat nasional kepada mereka yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di bidang pangan dan gizi, untuk memotivasi dan memperluas peranserta lembaga-lembaga



pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat maupun perorangan untuk melakukan hal serupa.

12. Melaksanakan Kerjasama antara wilayah.

- a. **Penggalangan Kerjasama antara wilayah Dalam Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.** Kegiatan ini dimulai dengan membangun Aliansi daerah Melawan Kelaparan, untuk membangun kepedulian, memperkuat komitmen dan mendorong aksi-aksi nyata mencegah dan mengatasi masalah kelaparan, membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi pemerintah, pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kreativitas mengatasi masalah, dan melakukan pertukaran informasi pengalaman berharga dari masing-masing lembaga.
- b. **Perbaiki Kinerja Sektor Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan.** Kegiatan ini meliputi pembekalan terhadap para pejabat dengan informasi yang memadai tentang situasi dan peluang kerja sama dengan berbagai daerah dan lembaga-lembaga nasional untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, dan berdasarkan informasi tersebut meningkatkan intensitas diplomasi dengan fokus yang spesifik dan efektif.

13. Mengembangkan Sumber Daya Manusia

- a. **Perbaiki Progam Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan di bidang Pangan.** Kegiatan ini meliputi penataan kembali kelembagaan, peningkatan kualifikasi tenaga pengelola dan pelaksana, peningkatan mutu penyelenggaraan, serta



pengembangan jaringan kerja sama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

- b. **Pemberian Muatan Pangan dan Gizi Pada Pendidikan Formal dan Nonformal.** Kegiatan ini meliputi penyusunan program dan kurikulum yang tepat untuk masing-masing segmen dan tingkatan, sosialisasi kepada pihak terkait dan penerapan secara partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan.
- c. **Pemberian Jaminan Pendidikan Dasar dan Menengah Khususnya Bagi Perempuan dan Anak-anak di Pedesaan.** Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan fasilitasi kepada pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh kebijakan wajib belajar sembilan tahun, dengan penajaman prioritas pada perempuan dan anak-anak di pedesaan. Dana alokasi khusus bidang pendidikan, dikombinasikan dengan dana pemerintah daerah dan dana sumbangan masyarakat, digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

14. Kebijakan Makro dan Perdagangan yang Kondusif

- a. **Kebijakan Fiskal yang Memberikan Insentif bagi Usaha Pertanian.** Hal ini dilakukan dengan pemberian keringanan pajak bagi para pelaku usaha di bidang pertanian dan pengolahan pangan untuk mendorong pertumbuhan investasi usaha berbasis pertanian dan pangan.
- b. **Alokasi APBN dan APBD yang Memadai untuk Pengembangan Sektor Pertanian dan Pangan.** Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan pemberian pemahaman serta umpan balik kepada lembaga pemerintah yang berkompeten



termasuk lembaga legislatif, untuk memberikan anggaran memadai bagi sektor pertanian dan pangan.

- c. **Kebijakan Perdagangan yang Memberikan Proteksi dan Promosi bagi Produk Pertanian Strategis.** Hal ini mencakup penerapan berbagai instrumen dan regulasi perdagangan secara arif untuk melindungi dari persaingan yang tidak menguntungkan dan memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing produk pertanian.

Peran aktif dan koordinasi yang sinergis bagi seluruh sektor dan bidang dalam pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, sampai Pemerintah Desa beserta masyarakat, merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional.

2.2. Rencana Kerja

Rencana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana tahun 2019 diprioritaskan kepada pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran ketahanan pangan
2. Dipertahankannya ketersediaan energi perkapita minimal 2500 kkal/hari dan protein perkapita 57 gram/hari.
3. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan 1% pertahun;
4. Makin mantapnya distribusi, harga dan akses pangan;
5. Tercapainya kecukupan konsumsi energi perkapita minimal 2000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gr/hari;



6. Meningkatnya keamanan pangan segar.
7. Meningkatkan adopsi teknologi spesifik lokasi
8. Meningkatkan temu penyuluhan pada berbagai tingkatan
9. Meningkatkan mutu perencanaan penyuluhan pada berbagai tingkat (Desa/Kel. Kecamatan dan Kabupaten).

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas telah ditetapkan serangkaian **program dan kegiatan** tahun 2021 yang disajikan dalam lampiran 1 Formulir Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana tahun 2021 .

2.3. Perjanjian Kinerja (Terlampir)

2.4. Program, Kegiatan dan Anggaran

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Penyediaan Alat Tulis Kantor



- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan (koran, Majalah, Tabloid) dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan Jasa Publikasi
 - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Komputer
 - Pengadaan Peralatan Musik
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD

A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Program peningkatan ketahanan pangan diarahkan untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat, dan halal. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini antara lain :

- Analisis Akses Pangan.
- Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
- Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
- Pengembangan Teknologi Produk Pangan Lokal
- Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan.
- Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar
- Perencanaan Penyusunan Program dan Monev



A. Rincian Keuangan

Rincian APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana tahun 2020

Tabel 1. APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	BELANJA	2.737.876.774,,00
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.618.515.216,00
	Belanja Pegawai	1.618.515.216,00
B.	BELANJA LANGSUNG	1,119,361,558,00
	Belanja Pegawai	284,887,785,00
	Belanja Barang dan Jasa	775.482.881,00
	Belanja Modal	58.990.892,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.737.876.774,00)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2019 yaitu Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2019 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBD.

Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu Kegiatan yang dapat berupa fisik dan /atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output



jumlah perda, Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).

Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/ program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$



- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. *Analisis efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi



keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana tahun 2020 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, dapat disimpulkan sebagai berikut :

B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana disajikan dalam tabel 3.1. (setelah perubahan) adalah :



Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2021

Uraian		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
A.	BELANJA	2.737.876.774,00	2,604,728,253	95
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Operasi	2,686,885,882	2,449,313,329	
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten kota	2,417,447,319	2,285,138,259	
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,525,059	10,426,050	
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,908,572,558	1,781,196,857	
	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,200,000	7,200,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,250,000	11,550,000	



Administrasi Umum Perangkat Daerah	347,573,202	347,491,000
Pengadaan Barang Milik Daerah	5,000,000	4,942,500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48,500,000	48,067,846
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,826,500	74,864,000
2. Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan	242,238,863	242,140,900
2.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	29,398,339	29,335,300
2.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	9,991,224	9,978,800



Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi PanganPerkapita/Tahu n sesuai dengan Angka KecukupanGizi	185,649,682	185,648,300
3. Program Pelaksanaan Kerawanan Pangan	17199,658	17,178,500
3.1 Penyusunan Peta Kerentanan dan KetahananPangan Kecamatan	17, 199,659	17,178,500
4. Prgram Pengawasan Kwamanan Pangan	14,699,700	14.699.100
4.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan SegarDaerah Kabupaten/Kota	14,699,700	14,699,100



	BELANJA LANGSUNG			
	1 Program Penunjang Urusan Pemeribntahan Darah Kabupaten/Kota			
	1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	9,500,000	9,500,000	
	1.2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	41,490,892	40,750,000	
	2 Program Pengawasan Keamanan Pangan	12,500,000	12,500,000	
	2.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan SegarDaerah Kabupaten/Kota	12,500,000	12,500,000	
B	SURPLUS (DEFISIT)	(2,737,876,774)	2,604,728,253	



3.1 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021

3.1.1. Capaian Kinerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga (3) Sub Bidang yang terdiri atas : 1). Seksi Ketersediaan, 2) Seksi Kerawanan Pangan dan 3) Seksi Sumberdaya Pangan.

a. Perbandingan Kinerja antara target dan realisasi Tahun Anggaran 2021

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang meliputi pengembangan sumber daya ketersediaan dan indikasi kerawanan pangan dengan sumberdaya pangan.

Dalam mencapai kinerja pada bidang tersebut dilakukan melalui beberapa program/kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



b. Perbandingan Kinerja antara Realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021 Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana

Misi	Sasaran	Indikator	Realisasi		%	Δ%
			2021	2020		
Mengidentifikasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang rawan pangan	Daerah Rawan Pangan	Akses fasilitas umum yang belum memadai	Tersedianya data penduduk rawan pangan	Data penduduk anak stunting	100	
	Peta kerawanan pangan	Adanya dokumen/peta kerawanan pangan	Tersedianya FSVA	Tersedianya data dukung peta FSVA		
	Jumlah penggilingan padi dan rantai jemur	Meningkatnya jumlah penggilingan padi di masyarakat	Terbangunnya rantai jemur pada kelompok tani di daerah swadaya produksi pertanian	Kelompok Tani membuat usulan proposal dengan RAB dan kengurusannya kelompok		

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga yang dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran ketahanan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti



kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan dan sebagainya. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan dan ketergantungan eksternal yang menjadi serangkaian faktor resiko. Meski berbagai Negara sangat menginginkan keswasembadaan secara perorangan untuk menghindari resiko kegagalan transportasi, namun hal ini sangat sulit dicapai di Negara maju karena profesi masyarakat yang sudah sangat beragam dan tingginya biaya produksi bahan pangan jika tidak diindustrialisasikan.

Ketahanan pangan terdiri atas tiga (3) komponen utama yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pekarangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumberdaya, secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar *dan* tepat secara proporsional. Disamping itu, kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, sangat penting untuk memahami tentang jumlah penduduk yang rentan terhadap



kerawanan pangan dan gizi dimana mereka tinggal dan penyebab mendasar kerentanan mereka yang digambarkan dalam peta untuk mempermudah pemahaman banyak pihak. Peta ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan memberi informasi kepada proses pembuatan kebijakan dibidang ketahanan pangan.

Peta ini merupakan hasil kerjasama dari berbagai instansi terkait Dinas/Badan/Kantor dan unit ketahanan pangan dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten. Kolaborasi ini sangat ditentukan oleh indicator yang membentuk FSVA itu sendiri yang didasarkan pada tiga dimensi ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.

FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) menggunakan 13 indikator yang tersedia ditingkat kecamatan yang mampu mengukur berbagai aspek ketahanan pangan dan gizi yang membagi indikator tersebut menjadi dua (2) kelompok yaitu kerawananan pangan kronis dan kerawanan pangan transien. Indikator transien menjelaskan factor iklim dan lingkungan yang mempengaruhi kerawanan pangan dari aspek ketersediaan dan akses pangan, sedangkan indikator kerawananan pangan kronis diukur dari ketersediaan pangan dan akses pangan dan pemanfaatan pangan.



3.1.2 Capaian Kinerja Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga (3) Sub Bidang yang terdiri atas : 1). Sub Bidang Harga Pangan 2). Sub Bidang Distribusi Pangan dan 3) Sub Bidang Cadangan Pangan

1. Perbandingan Kinerja antara target dan realisasi Tahun Anggaran 2021 Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana

Bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang distribusi dan cadangan pangan .

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi dan cadangan pangan
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan



4. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dibidang distribusi dan cadangan pangan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi dan cadangan pangan
6. Penyiapan pelaksanaan koordinasi operasional dibidang distribusi dan cadangan pangan
7. Koordinasi, monitoring, evaluasi , informasi dan promosi terhadap dibidang distribusi dan cadangan pangan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Pencapaian Kinerja pada bidang tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan Program/kegiatan sebagaimana disajikan :

**Perbandingan Kinerja antara Realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021
Bidang distribusi dan cadangan pangan Ketahanan Pangan Kabupaten
Bombana**



Misi	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja 2020	Target Renstra 2021	%
Meningkatkan penguatan kelembagaan ketahanan pangan di tingkat masyarakat	Lembaga Distribusi Pangan Pemerintah	Meningkatnya jumlah LDPM, TTI, PUPM dan lembaga lainnya	Bantuan gabah pada kelompok tani yang tersebar di beberapa kecamatan	Bantuan beras pada Toko Tani Indonesia Center (TTI) Senter	

3.1.3 Capaian Kinerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga (3) Sub Bidang yang terdiri atas : 1). Sub Bidang Konsumsi Pangan 2). Sub Bidang Keamanan Pangan dan 3) Sub Bidang Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan

Bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan dibidang konsumsi dan keamanan pangan.



2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
4. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dibidang distribusi dan cadangan pangan
5. Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi di dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
6. Penyiapan pelaksanaan koordinasi operasional di dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
7. Koordinasi, monitoring, evaluasi , informasi dan promosi terhadap di dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Pencapaian Kinerja pada bidang tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan Program/kegiatan sebagaimana disajikan :

Perbandingan Kinerja antara Realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021 Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana

Misi	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatnya Kemampuan	50.438.000	50.345.500	99,81



kemampuan kepemimpinan manajerial dan kewirausahaan kelompok wanita tani	Kesejahteraan Petani	dan Keterampilan kelompok wanitatani melalui pelatihan			
	Memberikan peluang usaha kelompok wanitatani	Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman pemanfaatan pekarangan	45,649,682	45,648,300	99,99
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sumber dana DAK non Fisik	Meningkatnya jumlah partisipasi kelompok wanita tani	140,000,000	140,000,000	100
	Meningkatkan Informasi Data Kelembagaan Petani dalam pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya sistem penguatan kelembagaan kelompok wanitatani	12,500,000	12,500,000	100

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target,



realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efektivitas yang dilakukan dengan memberikan data nilai outcome per unit yang dihasilkan oleh suatu output tertentu.

Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output, sedangkan efektivitas ditandai dengan berfungsinya seluruh keluaran (output) pada tingkat hasil (outcome). Suatu kegiatan dikatakan efisien/ efektif apabila tingkat capaian masing-masing di atas 100,00%.

a. Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2021 adalah Rp. **2,737,876,774,00** Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2021 adalah Rp. **2,604,728,253,00** atau 95%.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana selama kurun waktu tertentu.

Secara umum pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bombana ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro/ tingkat rumah tangga dan individu serta di tingkat makro/ daerah dan nasional melalui pengembangan sub sistem Ketersediaan pangan, sub sisten distribusi pangan, sub sistem konsumsi dan keamanan pangan serta penanggulangan daerah rawan pangan dengan memperhatikan potensi dan keragaman sumberdaya wilayah setempat, maka tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang



dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dengan cara :

1. Meningkatkan sarana pendukung administrasi perkantoran Dinas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
3. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
4. Memantapkan sistem distribusi, harga dan akses pangan;
5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
6. Meningkatkan penanganan keamanan pangan segar.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan
2. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi, harga, akses, konsumsi, dan keamanan pangan segar;



3. Mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA)
4. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal;
5. Mengembangkan forum sistem keamanan pangan daerah.

Untuk mendukung strategi di atas, maka ditempuh berbagai kebijakan pendukung, yaitu :

5. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur melalui :
 - a. Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - b. Penyediaan jasa layanan administrasi perkantoran
- c. Meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, melalui :
 - a. Koordinasi lintas sektoral
 - b. Peningkatan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan
- d. Peningkatan sistem distribusi, stabilitas harga, dan cadangan pangan melalui :
 - a. Koordinasi lintas sektor;
 - b. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat;



- c. Pengembangan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

- d. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan melalui :
 - a. Koordinasi lintas sektoral;
 - b. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - c. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing;Pengembangan penanganan keamanan pangan segar



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan Pertanian, Perikanan dan antara lain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat terutama bagi petani dan kelompok wanita tani beserta keluarganya. Hal ini sejalan dengan Visi pemerintah daerah Kabupaten Bombana yaitu menuju masyarakat sejahtera (MUNAJAH). Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merumuskan sasaran yang diinginkan dalam mencapai tujuan atau visi tersebut antara lain adalah Analisis Akses Pangan; Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; Pengembangan Lumbung Pangan Desa; Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif; Pengembangan Teknologi Produk Pangan Lokal; Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan; Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan; Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar; Perencanaan Penyusunan Program dan Monev; Peningkatan Partisipasi Perempuan pada kegiatan pemberdayaan perempuan.



Pelaksanaan program tersebut didukung oleh dana sebesar **Rp. 2,737,876,774,00** dan dana tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 2,604,728,253,00**

Dalam pelaksanaan program tersebut ditemui adanya kendala-kendala antara lain : 1) Ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi akan memicu gejolak harga dan distribusi pangan. 2.) Ancaman terjadinya bencana banjir dan kekeringan sebagai dampak eksploitasi sumber daya lahan serta cuaca ekstrim berpotensi menghambat kelancaran distribusi dan optimalisasi produksi pangan.



L A M P I R A N

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana
Tahun 2021*

